

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KURIKULUM SEKOLAH DI NUSA TENGGARA TIMUR: TANTANGAN DAN PELUANG

Sesilia Bongi Ruron¹, Yoriana Atti², Theresia B.S. Keransj³, Yeremia Kabnani⁴,
Fadil Mas'ud⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Alamat e-mail : sesiliataehyung@gmail.com

ABSTRACT

Human Rights Education (HRE) plays a strategic role in shaping students' character by promoting values of justice, equality, and respect for human dignity. This article aims to analyze the implementation of human rights education in the school curriculum of East Nusa Tenggara Province and to identify the challenges and opportunities associated with it. The study employs a qualitative approach, with data collected through document analysis, interviews, and observations of learning practices in schools. The findings indicate that the implementation of human rights education still faces several obstacles, including limited teachers' understanding, a lack of contextualized teaching materials, and insufficient policy support and educational facilities. Nevertheless, there are opportunities that can be leveraged, such as integrating human rights values into various subjects, strengthening teachers' roles as agents of change, and utilizing local cultural values that uphold humanity and social cohesion. Therefore, synergy among the government, educational institutions, and the community is essential to strengthen the sustainable implementation of human rights education in order to create an inclusive and just school environment.

Keywords: Human Rights Education, School Curriculum, East Nusa Tenggara, Educational Challenges, Educational Opportunities

ABSTRAK

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang menjunjung nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan HAM dalam kurikulum sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi terhadap praktik pembelajaran di sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan HAM masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan pemahaman guru, minimnya materi ajar kontekstual, serta kurangnya dukungan kebijakan dan sarana pendukung. Namun demikian, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain integrasi nilai-nilai HAM dalam mata pelajaran, penguatan peran guru sebagai agen perubahan, serta dukungan budaya lokal yang

menjunjung nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi pendidikan HAM secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pendidikan Hak Asasi Manusia, Kurikulum Sekolah, Nusa Tenggara Timur, Tantangan Pendidikan, Peluang Pendidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran krusial dalam membentuk karakter bangsa serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal dalam ranah pendidikan. Melalui pendidikan HAM, peserta didik tidak hanya diarahkan sebagai upaya untuk membentuk pemahaman mengenai peran, hak, dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga diharapkan mampu menginternalisasi nilai empati, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari (UNESCO, 2021). Di Indonesia, penerapan pendidikan HAM telah diatur melalui sejumlah kebijakan, di antaranya berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 mengenai Pendidikan dan Pelatihan

HAM, yang menegaskan urgensi pengarusutamaan prinsip-prinsip HAM di seluruh jenjang pendidikan, baik formal maupun nonformal (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022).

Meskipun demikian, penerapan pendidikan Hak Asasi Manusia di lingkungan sekolah masih belum menunjukkan hasil yang optimal, terutama di daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang menantang seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini termasuk dalam kategori dengan tingkat pembangunan manusia yang relatif rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 69,64, masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 74,39. Rata-rata lama sekolah masyarakat NTT juga masih sekitar 7,63 tahun, menunjukkan bahwa

sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pendidik bersertifikat, serta ketimpangan akses antarwilayah kepulauan (Ombudsman Republik Indonesia, 2023a).

Tantangan tersebut berdampak langsung pada penerapan nilai-nilai HAM dalam pembelajaran. Guru sering kali belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam proses belajar mengajar, baik melalui kurikulum maupun praktik pembelajaran kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan HAM belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya sekolah, melainkan masih dianggap sebagai tambahan nilai moral tanpa strategi implementasi yang sistematis (Yuliana & Mulyana, 2022)

Peran guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia di sekolah. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun budaya sekolah yang damai dan menjunjung

nilai kebhinekaan melalui proses pembelajaran yang menekankan toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta penguatan nilai-nilai demokrasi. Temuan ini sejalan dengan upaya implementasi pendidikan HAM dalam kurikulum sekolah di Nusa Tenggara Timur, di mana guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dan agen perubahan dalam menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial kepada peserta didik. (Istianah dkk., 2024)

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih adanya pekerja anak di Kota Kupang yang mengabaikan hak atas pendidikan. Temuan ini menjadi tantangan penting bagi pendidikan HAM di sekolah di Nusa Tenggara Timur, sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dan masyarakat mengenai hak anak melalui integrasi materi HAM dalam kurikulum (Mas'ud, 2019)

Selain itu, tantangan implementasi pendidikan HAM juga berkaitan dengan rendahnya literasi hukum dan hak warga negara.

Sebagian besar siswa di daerah pedesaan NTT belum memahami konsep dasar HAM dan tanggung jawab sosial karena kurangnya sumber belajar yang relevan dengan konteks lokal. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas guru, mengembangkan bahan ajar berbasis konteks daerah, dan memperluas kerja sama antar lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sipil (Sudjana, 2021)

Pendidikan etika di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter moral peserta didik, yang secara langsung mendukung internalisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. (Ence dkk., 2025) menekankan bahwa pendidikan etika mampu menanamkan prinsip moral, tanggung jawab, dan kesadaran sosial yang menjadi dasar perilaku adil dan menghormati hak orang lain. Dalam konteks implementasi pendidikan HAM di kurikulum sekolah di Nusa Tenggara Timur, pendidikan etika dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang hak-hak individu, membangun sikap toleran, dan menciptakan lingkungan sekolah yang berkeadilan. Dengan demikian, integrasi pendidikan etika dan HAM

membuka peluang bagi pengembangan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik yang tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya di era digital. Kale, Mas'ud, dan Nassa (2025) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter bangsa yang berlandaskan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial di tengah arus informasi digital yang semakin kompleks. Perspektif ini relevan dengan implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia dalam kurikulum sekolah di Nusa Tenggara Timur, karena nilai-nilai HAM seperti penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, serta sikap kritis dan toleran menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Dengan demikian, integrasi pendidikan HAM dalam pembelajaran, khususnya melalui Pendidikan Kewarganegaraan, membuka peluang untuk memperkuat karakter

peserta didik agar mampu bersikap demokratis dan berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Kale dkk., 2025)

Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk memperkuat implementasi pendidikan HAM di NTT. Pemerintah daerah, bersama dengan lembaga pendidikan tinggi seperti Universitas Nusa Cendana, telah mulai mengembangkan program pelatihan guru berbasis HAM dan pendidikan karakter (Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, 2024). Upaya ini membuka ruang bagi terciptanya sinergi antara kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan lokal yang khas. Melalui pemanfaatan nilai-nilai budaya daerah dan potensi komunitas, pendidikan HAM diharapkan dapat diimplementasikan secara lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana pendidikan HAM diintegrasikan dalam kurikulum sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoretis terhadap

pengembangan model penerapan pendidikan HAM yang berlandaskan pada konteks lokal, serta menjadi acuan praktis bagi lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam memperkuat proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurikulum pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan ini dipilih karena isu pendidikan HAM bersifat kontekstual dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik (Creswell, 2018)

1. Lokasi Dan Informasi

Penelitian dilakukan di satu wilayah yaitu Kupang, yang mewakili keragaman sosial dan budaya NTT (BPS, 2023). Informan dalam penelitian ini meliputi guru, kepala sekolah, serta pejabat dari Dinas Pendidikan, yang

ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan tingkat keterlibatan mereka dalam implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). (Sugiyono, 2019)

2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama: wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta penelaahan dokumen, termasuk kurikulum sekolah dan laporan pelatihan guru. (Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, 2024). Wawancara dilaksanakan dengan pendekatan semi-terstruktur agar data yang diperoleh bersifat terbuka dan mendalam, tetapi tetap berada dalam kerangka yang terarah.

3. Analisis Data

Proses analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, terdiri atas tiga langkah pokok, yakni

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. (Miles dkk., 2014) Keabsahan data diverifikasi melalui penerapan teknik triangulasi sumber serta proses member check untuk memastikan validitas temuan penelitian. (Moleong, 2021).

4. Pendekatan Konseptual

(Mas'ud dkk., 2025) menekankan bahwa penguatan literasi hukum melalui pendidikan bahasa mampu membekali peserta didik dengan kemampuan memahami norma, hak, dan tanggung jawab secara kritis, terutama di era digital. Secara konseptual, hal ini relevan dengan implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia dalam kurikulum sekolah di Nusa Tenggara Timur, karena literasi hukum dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap prinsip-prinsip HAM,

menumbuhkan kesadaran akan hak anak, dan membentuk perilaku yang bertanggung jawab serta menghormati hak orang lain.

Dengan metode ini, penelitian berupaya menelusuri tantangan dan peluang implementasi pendidikan HAM di NTT, serta merumuskan model pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat.

pedagogis pendidik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam proses kegiatan pembelajaran. Guru yang belum tersertifikasi umumnya tidak memiliki kompetensi profesional yang cukup untuk mengaitkan nilai-nilai kemanusiaan dengan materi pelajaran (Sugiyono, 2019)).

2. Kualitas Pendidikan dan Kesenjangan Mutu Sekolah

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2023a), Pada periode tahun 2023, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebesar 69,64, yang menunjukkan posisi masih di bawah rata-rata nasional yaitu 74,39.

Selain itu, hanya 164 dari 1.013 sekolah menengah yang memiliki akreditasi A (Ombudsman Republik Indonesia, 2023b) Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan mutu pendidikan yang signifikan di antara wilayah-wilayah di NTT. Sekolah-sekolah dengan akreditasi rendah cenderung memiliki keterbatasan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Umum Implementasi Pendidikan HAM di NTT

Implementasi pendidikan HAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan kemajuan yang bersifat gradual, namun masih menghadapi hambatan baik dari sisi struktural maupun kultural.

Menurut (Ombudsman Republik Indonesia, 2023c), dari total sekitar 18.000 guru SMA di NTT, hanya ±22% (sekitar 5.000 guru) yang telah memiliki sertifikat pendidik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan

fasilitas dan sumber daya manusia, yang berdampak langsung terhadap efektivitas penerapan nilai-nilai HAM (Miles dkk., 2014; Moleong, 2021)

3. Upaya Pemerintah dalam Penguatan Pendidikan HAM

Dalam Pelaksanaa Program Dimensi HAM (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022) untuk Sekolah Ramah HAM di beberapa daerah, seperti Kupang dan Manggarai Timur. Program ini menekankan pada peningkatan kesadaran siswa terhadap pencegahan perundungan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Selain Itu juga (Komnas HAM RI, 2023) memperkenalkan model Sekolah Ramah HAM, yang mengutamakan nilai inklusivitas, partisipasi, dan keadilan dalam tata kelola sekolah. Program tersebut menunjukkan adanya langkah positif dari pemerintah, meskipun pelaksanaannya di tingkat sekolah masih terbatas pada wilayah tertentu (Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, 2024)

4. Rendahnya Pemahaman Guru dan Siswa terhadap HAM

pendidikan HAM di NTT cenderung bersifat formal dan normatif, tanpa keterkaitan langsung dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu (Yuliana & Mulyana, 2022) juga menegaskan bahwa lemahnya pemahaman guru terhadap konsep HAM disebabkan oleh kurangnya pelatihan, keterbatasan sumber belajar, serta minimnya dukungan kebijakan sekolah. Akibatnya, pembelajaran HAM sering kali tidak kontekstual dan tidak berdampak signifikan terhadap perubahan perilaku siswa.

5. Faktor Penghambat

Implementasi Pendidikan HAM

Implementasi pendidikan HAM di NTT menghadapi tiga tantangan utama:

- a. Keterbatasan Kompetensi Guru
Guru yang belum tersertifikasi kurang memiliki pemahaman pedagogis untuk mengintegrasikan HAM dalam pembelajaran (Creswell, 2018; Sugiyono,

2019). Pelatihan pendidikan karakter dan HAM bagi guru di daerah pedesaan masih minim.

b. Keterbatasan Sumber Daya Pendidikan

Sekolah berakreditasi rendah memiliki sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga sulit menerapkan prinsip inklusivitas dan partisipasi aktif siswa (Miles dkk., 2014; Moleong, 2021) Ketimpangan infrastruktur memperburuk akses pendidikan yang berkeadilan bagi anak-anak di daerah terpencil.

c. Kurangnya Integrasi Budaya Lokal dalam Pendidikan HAM

Pendidikan HAM belum banyak memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai sumber pembelajaran.

6. Peluang Penguatan

Implementasi Pendidikan HAM

Program Sekolah Ramah HAM di beberapa sekolah di NTT menjadi langkah strategis dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan pendidikan (Komnas HAM RI,

2023) Kolaborasi antara pemerintah daerah, universitas seperti Universitas Nusa Cendana, dan lembaga masyarakat membuka ruang untuk mengembangkan kurikulum HAM yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, 2024)

Melalui kemitraan lintas sektor ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas guru, pengayaan bahan ajar, serta penguatan budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, pendidikan HAM di NTT belum berjalan optimal karena masih terbatas pada pendekatan formalistik. Upaya implementasi akan lebih efektif jika dilakukan melalui:

1. Peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan HAM yang kontekstual,
2. Pemerataan mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan akreditasi sekolah, serta
3. Integrasi nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai kemanusiaan.

Pendekatan kolaboratif antara guru, sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan HAM di NTT (Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur, 2024; Komnas HAM RI, 2023).

E. Kesimpulan

Implementasi pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) di kurikulum sekolah di Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya kombinasi antara tantangan yang signifikan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sisi tantangan, penelitian ini menemukan beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan pemahaman guru mengenai konsep dan prinsip HAM, kurangnya materi ajar yang relevan dan kontekstual, serta minimnya dukungan dari kebijakan pendidikan dan sarana-prasarana yang memadai. Kendala-kendala tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas internalisasi nilai-nilai HAM di kalangan peserta didik, sehingga potensi pendidikan HAM untuk membentuk karakter yang adil, toleran, dan menghormati hak sesama belum sepenuhnya tercapai.

Di sisi lain, terdapat berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat implementasi pendidikan HAM. Pertama, integrasi nilai-nilai HAM ke dalam berbagai mata pelajaran memberikan kesempatan bagi guru untuk menanamkan kesadaran akan hak-hak individu dan tanggung jawab sosial secara lebih sistematis. Kedua, guru dapat berperan sebagai agen perubahan yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam praktik penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Ketiga, budaya lokal di Nusa Tenggara Timur yang menekankan nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan toleransi dapat dijadikan basis untuk menguatkan pemahaman peserta didik tentang HAM secara kontekstual.

Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan agar pendidikan HAM dapat diterapkan secara berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, kurikulum sekolah tidak hanya menjadi media pembelajaran akademik, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter peserta didik yang

menghargai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Peningkatan kualitas pendidikan HAM di sekolah di Nusa Tenggara Timur berpotensi menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, adil, dan demokratis, serta menyiapkan generasi muda yang sadar akan hak-hak mereka sendiri maupun hak orang lain, mampu berperilaku etis, dan berkontribusi positif dalam pembangunan masyarakat yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. BPS.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur. (2024). *Laporan Kinerja Pendidikan Daerah 2024*.
- Ence, E., Mas'ud, F., Tonis, M., Payong, E. W., Openg, W. F. K., & Laga, O. E. (2025). Membangun Karakter Moral Melalui Pendidikan Etika di Sekolah. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 247–260.
- Istianah, A., Irawan, H., & Mas'ud, F. (2024). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Sekolah Damai Berkebhinnekaan. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn*, 11(02).
- Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, 25(1), 9–14.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Laporan Nasional Implementasi Pendidikan dan Pelatihan HAM*.
- Komnas HAM RI. (2023). *Catatan tentang Kebijakan Jam Masuk Sekolah di NTT*. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id>
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11–19.
- Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, 5(2), 9–21.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023a). *Distribusi Tenaga Guru dan Pelaksanaan Sertifikasi di Provinsi NTT*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2023b). *Distribusi Tenaga Guru dan*

Sertifikasi Pendidikan di NTT.
Ombudsman RI.

Ombudsman Republik Indonesia. (2023c). *Sulitnya Akses Pendidikan di NTT*. Ombudsman RI Perwakilan NTT. <https://ombudsman.go.id>

Sudjana, N. (2021). Model Penguatan Pendidikan HAM dalam Konteks Multikultural. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8(2), 144–158.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.

UNESCO. (2021). *Human Rights Education and Global Citizenship: Framework for Schools*. UNESCO.

Yuliana, S., & Mulyana, D. (2022). Integrasi Pendidikan HAM dalam Kurikulum Sekolah: Tantangan dan Solusi Kontekstual di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(3), 211–225.